



PENGARUH TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN

Retno Febriyastuti Widyawati¹, Fani Suma Pratama², Jeane Fransina Diana Talakua³
Elisabeth Nainggolan⁴

¹Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang

²Pengadilan Agama Semarang, Mahkamah Agung

³Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang

⁴Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasteya

¹retnofw@mail.unnes.ac.id@gmail.com*, ²fa2n@mahkamahagung.go.id,

³talakuajeanece@mail.unnes.ac.id, ⁴elisabeth.golan@gmail.com

ABSTRAK

Kemiskinan masih menjadi tantangan utama pembangunan daerah di Kabupaten Batang. Namun, penelitian yang secara komprehensif menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam jangka panjang masih terbatas, sehingga menciptakan research gap terkait faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap kemiskinan daerah. Penelitian ini bertujuan mengisi gap tersebut dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan data BPS periode 2007–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TPAK berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan, yang mengindikasikan belum seimbanginya peningkatan partisipasi kerja dengan ketersediaan lapangan kerja produktif. IPM berpengaruh negatif namun tidak signifikan, menandakan bahwa peningkatan kualitas hidup belum merata di seluruh masyarakat. Sebaliknya, laju PDRB berpengaruh negatif dan signifikan, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara nyata mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah daerah disarankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, serta memperluas lapangan kerja produktif—khususnya melalui program padat karya pada sektor pertanian, industri, dan pariwisata..

Kata Kunci : TPAK, IPM, Laju PDRB, Kemiskinan

ABSTRACT

Poverty remains one of the major development challenges in Batang Regency. However, comprehensive long-term analyses examining the influence of the Labor Force Participation Rate (LFPR), Human Development Index (HDI), and Gross Regional Domestic Product (GRDP) growth on poverty are still limited, creating a research gap regarding the key determinants of regional poverty. This study addresses this gap using a quantitative approach with secondary data from Statistics Indonesia (BPS) for the period 2007–2024. The results show that LFPR has a positive but insignificant effect on poverty, indicating that the increase in labor participation is not yet matched by sufficient productive employment opportunities. HDI has a negative but insignificant effect, suggesting that improvements in education, health, and living standards have not been evenly distributed across the population. In contrast, GRDP growth has a negative and significant effect, demonstrating that economic growth has effectively contributed to reducing poverty in Batang Regency. Based on these findings, it is recommended that the local government promote more inclusive economic growth, improve human capital through investment in education and health, and expand productive employment opportunities—particularly through labor-intensive programs in the agriculture, industry, and tourism sectors.

Keywords: LFPR, IPM, GRDP Rate, Povert



Lisensi

Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

1. Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi persoalan mendasar dalam pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Batang. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Batang pada periode 2007–2024 menunjukkan pola pergerakan yang cenderung fluktuatif namun dengan tren menurun dalam jangka panjang.

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Batang, 2007–2024

Tahun	Persentase (%)
2007	20,79
2008	18,08
2009	17,65
2010	14,67
2011	13,47
2012	12,40
2013	11,96
2014	11,13
2015	11,27
2016	11,04
2017	10,80
2018	8,69
2019	8,35
2020	9,13
2021	9,68
2022	9,63
2023	8,92
2024	8,73

Sumber: BPS Kabupaten Batang, 2025

Tabel 1 memperlihatkan perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Batang selama periode 2007 – 2024. Secara umum, tren kemiskinan di Kabupaten Batang menunjukkan penurunan yang cukup konsisten meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa tahun tertentu. Angka kemiskinan pada tahun 2007 di Kabupaten Batang masih tinggi yaitu sebesar 20,79 persen. Kondisi ini mencerminkan beban ekonomi masyarakat pada masa itu karena sebagian besar

penduduk masih berada di bawah garis kemiskinan. Namun dalam beberapa kurun waktu tertentu pada tahun-tahun berikutnya, persentase penduduk miskin mengalami penurunan cukup signifikan. Pada tahun 2011, kemiskinan di Kabupaten Batang turun hingga sekitar 14 persen dan terus berlanjut menurun sampai stabil di kisaran 10 sampai 11 persen pada tahun 2013-2017. Pada tahun 2018-2019 angka kemiskinan kembali menurun tajam hingga menyentuh angka di bawah 9 persen. Hal ini menandakan capaian terbaik di Kabupaten Batang dalam periode tersebut. Namun pada saat pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 membawa dampak serius terhadap perekonomian daerah sehingga angka kemiskinan naik kembali menjadi 9.13 persen dan hampir mendekati 10 persen pada tahun 2021-2022. Meski demikian, setelah situasi pandemi COVID-19 mulai membaik, pada tahun 2023-2024 angka kemiskinan kembali turun hingga berada pada kisaran 8 persen. Secara keseluruhan tabel 1 menunjukkan bahwa Kabupaten Batang berhasil menekan angka kemiskinan selama periode 2007-2024.

Penurunan angka kemiskinan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat yang tentunya tidak lepas dari beberapa kombinasi kebijakan pemerintah Kabupaten Batang supaya pertumbuhan ekonomi daerah dapat tinggi. Penurunan angka kemiskinan juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika ketenagakerjaan, khususnya melalui peran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Secara teori hubungan antara kemiskinan dan TPAK dapat dijelaskan dalam teori *labour supply* dan *poverty reduction*, dimana semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja maka akan semakin tinggi juga potensi rumah tangga untuk mendapatkan pendapatan dari

aktivitas pekerjaan yang dilakukannya. Todaro (2003) menyatakan bahwa peningkatan kesempatan kerja produktif merupakan salah satu instrumen yang paling efektif untuk mengurangi kemiskinan. Hal ini dikarenakan melalui pekerjaan maka masyarakat tidak hanya memperoleh pendapatan, namun juga masyarakat dapat meningkatkan kapasitas produksi di tingkat lokal maupun regional. Namun, literatur lain juga mengatakan bahwa peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja belum tentu berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan apabila pertumbuhan partisipasi tenaga kerja tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan kerja yang berkualitas.

Kemiskinan Kabupaten Batang selama 2007-2024 mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan daerah yang berkaitan dengan perluasan kesempatan untuk bekerja memberikan dampak nyata. Pemerintah daerah berupaya untuk mendorong investasi industri, penguatan UMKM, serta memberikan pelatihan vokasi dan keterampilan kerja lainnya yang dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan teori pembangunan manusia yang menekankan bahwa pembangunan bukan hanya pertumbuhan ekonomi saja, namun juga perluasan kapabilitas masyarakat agar dapat berpartisipasi secara produktif di pasar tenaga kerja sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Tabel 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Batang, 2007–2024

Tahun	Persentase (%)
2007	73,35
2008	72,06
2009	68,99
2010	72,66
2011	72,72

2012	72,45
2013	70,97
2014	71,67
2015	67,62
2016	67,70
2017	70,05
2018	68,53
2019	68,56
2020	69,78
2021	71,40
2022	74,90
2023	76,62
2024	77,91

Sumber: BPS Kabupaten Batang, 2025

Tabel 2 di atas merepresentasikan perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Batang tahun 2007– 2024. Secara umum, TPAK menggambarkan sebagian besar penduduk usia kerja yang aktif masuk ke pasar tenaga kerja baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Data TPAK Kabupaten Batang mengalami fluktuasi dari 2007-2024. Awal tahun 2007, TPAK berada pada angka 73,35 persen, lalu mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 67,62. Setelah itu terjadi tren peningkatan meskipun berfluktuatif. Peningkatan signifikan terlihat pada tahun 2021 TPAK naik dari 71,40 persen menjadi 74,90 persen pada tahun 2022, lalu terus mengalami peningkatan hingga mencapai 77,91 persen pada 2024. Pergerakan TPAK selama kurun waktu 2007-2024, partisipasi penduduk Kabupaten Batang dalam pasar kerja sempat menurun cukup tajam pada 2009-2016 yang disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya keterbatasan lapangan pekerjaan, perubahan dinamika ekonomi, atau bahkan penurunan minat angkatan kerja untuk masuk ke sektor produktif. Namun mulai tahun 2021, TPAK mulai mengalami kenaikan yang mengindikasikan adanya perbaikan kondisi, baik dari sisi kesempatan kerja maupun kebijakan

pemerintah daerah yang mendukung peningkatan serapan tenaga kerja. Hal ini merupakan sinyal positif karena partisipasi tenaga kerja yang tinggi biasanya merupakan modal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat penurunan kemiskinan. Dinamika TPAK dan kemiskinan di Kabupaten Batang 2007-2024 juga masih menyimpan beberapa masalah yang perlu dicermati. Pertama, meskipun TPAK meningkat tajam terutama setelah 2021, hal itu belum sepenuhnya menjamin bahwa seluruh tenaga kerja terserap dalam lapangan pekerjaan yang produktif. Kedua, kesenjangan kualitas sumber daya manusia juga masih menjadi persoalan penting karena tingginya TPAK belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan keterampilan dan pendidikan angkatan kerja.

Hasil keseluruhan tabel 2 di atas juga menunjukkan hal serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prayitno and Yustie (2020), yang mengatakan langkah awal pemerintah daerah untuk menurunkan tingkat kemiskinan adalah memberikan bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah lalu dilanjutkan dengan pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) untuk meningkatkan prospek lapangan kerja sehingga dapat mempercepat penurunan kemiskinan. Namun ternyata masih terdapat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa TPAK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, artinya meskipun nilai TPAK meningkat ataupun menurun, tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan atau peningkatan jumlah penduduk miskin (Nurkhin dkk, 2024). Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya yaitu peningkatan TPAK tidak diikuti dengan tersedianya lapangan kerja yang layak, tingkat pendidikan yang rendah

dan keterampilan tenaga kerja yang rendah juga dapat menyebabkan tenaga kerja tersebut tetap terjebak dalam pekerjaan dengan upah yang rendah sehingga tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan.

Indikator ekonomi penting yang berpengaruh terhadap kemiskinan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mencerminkan tiga dimensi utama pembangunan, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Hubungan antara IPM dan kemiskinan bersifat dua arah, yaitu disatu sisi, peningkatan IPM dapat menurunkan kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih baik, misalnya membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan formal dengan pendapatan yang tinggi. Dengan demikian, kondisi kesehatan yang baik memungkinkan penduduk usia produktif dapat bekerja secara optimal tanpa terganggu beban kerja maupun masalah fisik sehingga dapat mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga dan memperkuat daya beli. Hasilnya perbaikan capaian IPM pada akhirnya dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun disisi lain, tingginya angka kemiskinan justru dapat menghambat peningkatan IPM karena masyarakat miskin seringkali menghadapi keterbatasan biaya dalam hal akses dan biaya, baik untuk pendidikan maupun layanan kesehatan. Akibatnya kualitas sumber daya manusia sulit meningkat secara signifikan. Kondisi ini menciptakan lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*), dimana rendahnya pendapatan masyarakat akan menyebabkan rendahnya tabungan dan investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Situasi tersebut memperkuat kemiskinan struktural karena generasi berikutnya tetap menghadapi keterbatasan kesempatan yang sama.

Tabel 3. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Batang, 2007 – 2024

Tahun	Persentase (%)
2007	68,64
2008	69,23
2009	69,84
2010	61,64
2011	62,59
2012	63,09
2013	63,60
2014	64,07
2015	65,46
2016	66,38
2017	67,35
2018	67,86
2019	68,42
2020	68,65
2021	68,92
2022	69,45
2023	70,20
2024	70,73

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Tabel 3 merepresentasikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Batang selama periode 2007-2024. Awal periode tahun 2007, IPM tercatat sebesar 68,64 dan mengalami peningkatan pada tahun 2008 menjadi 69,23 hingga mencapai titi tertinggi pada 2009 sebesar 69,84. Pada tahun 2010 terjadi penurunan yang cukup tajam hingga 61,64 persen. Setelah tahun 2010, IPM Kabupaten Batang cenderung bergerak naik secara bertahap. Tahun 2010 sampai tahun 2014 meningkat perlahan dari 62,59 ke 64,07 dan IPM terus naik hingga mencapai 68,42 persen pada tahun 2019. Memasuki tahun 2020-2024, IPM Kabupaten Batang menunjukkan tren yang lebih stabil yang ditunjukkan pada tahun 2020 sebesar 68,65 persen lalu meningkat menjadi 70,73 persen pada tahun 2024. Secara umum, perkembangan IPM Kabupaten Batang menunjukkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat terutama pada aspek

pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil mendorong pembangunan manusia yang lebih inklusif. Namun masih dapat tantangan berupa kesenjangan kualitas pendidikan dan keterbatasan akses layanan kesehatan yang masih harus diperhatikan. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia diwujudkan melalui kebijakan daerah dengan cara memperluas pendidikan, memperkuat layanan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi supaya manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sering dipandang sebagai penggerak utama dalam upaya pemerintah mengurangi kemiskinan. Melalui pertumbuhan ekonomi, suatu daerah dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan pendapatan riil masyarakat, serta dapat memperluas kapasitas fiskal pemerintah dalam penyediaan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Secara teoritis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dijelaskan dalam konsep *growth poverty nexus* yang menekankan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan distribusi manfaat yang merata agar mempunyai dampak nyata untuk kesejahteraan kelompok miskin. Selain itu, teori dua sektor Lewis juga menggambarkan mekanisme transformasi struktural di mana alih tenaga kerja dari sektor tradisional berproduktivitas rendah menuju sektor modern yang lebih produktif menjadi kunci penting dalam menekan angka kemiskinan. Sejalan dengan kedua teori diatas maka penting untuk menelaah perkembangan laju pertumbuhan PDRB

Kabupaten Kabupaten Batang periode 2007–2024 yang ditunjukkan pada tabel 4 di bawah ini :

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Buruto Atas Harga Konstan Kabupaten Batang, 2007 – 2024

Tahun	Persentase (%)
2007	2,21
2008	2,17
2009	2,55
2010	2,00
2011	6,12
2012	4,62
2013	5,84
2014	5,31
2015	5,60
2016	5,03
2017	5,55
2018	5,72
2019	5,39
2020	-1,29
2021	4,88
2022	5,97
2023	5,53
2024	6,03

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Tabel 4 diatas menunjukkan perkembangan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang selama periode 2007-2024. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang cenderung berfluktuasi. Pada awal periode yaitu tahun 2007-2010, laju pertumbuhan PDRB relatif rendah (berkisar 2 sampai 2,5 persen). Kondisi ini mencerminkan efek krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 dan berdampak pada perekonomian daerah. Pada tahun 2011-2014, terjadi pertumbuhan yang cukup kuat dengan ditandai capaian tertinggi 6,12 persen pada tahun 2011, setelah itu kembali ke kisaran 5 sampai 5,84 persen pada tahun berikutnya. Periode 2015-2019 ditandai dengan laju pertumbuhan PDRB yang relatif stabil,

berkisar 5 sampai 5,39 pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 terjadi kontraksi ekonomi yang menyebabkan laju PDRB menjadi -1,29 persen yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Pemulihan setelah pandemi terlihat jelas setelah tahun 2021 dengan ditandainya pertumbuhan ekonomi yang kembali positif dan mencapai 6,03 persen pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan kemampuan Kabupaten Batang untuk dapat bangkit dari krisis dan mencapai laju pertumbuhan PDRB yang tinggi.

Berdasarkan latar belakang, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Batang selama periode 2007 – 2024. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus jangka panjang Kabupaten Batang dengan data 2007-2024. Penelitian ini juga secara integratif mengkombinasikan variabel makroekonomi berupa PDRB dengan variabel sosial melalui IPM serta indikator ketenagakerjaan berupa TPAK, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai faktor-faktor penentu kemiskinan di Kabupaten Batang. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah Kabupaten Batang dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada pengurangan kemiskinan.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data numerik. Data

penelitian berupa data runtut waktu (*time series*) dari tahun 2007-2024. Obyek penelitian di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan Kabupaten Batang sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, tren kemiskinan di Kabupaten Batang menunjukkan penurunan namun masih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan pembangunan yang perlu dikaji ulang. Kedua, struktur ekonomi masih ditopang pada sektor pertanian yang membuat masyarakat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, dan dinamika pasar tenaga kerja. Ketiga meskipun Kabupaten Batang masuk ke dalam proyek besar seperti pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), namun manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat miskin. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sumber data penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa Tengah, literatur akademik, dan berbagai sumber relevan lainnya yang terkait dengan isu kemiskinan.

Model penelitian menggunakan model regresi linier berganda *Ordinary Least Squares (OLS)*. Model yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon_i \dots\dots\dots(1)$$

Dimana:

- Y : Tingkat Kemiskinan pada tahun ke-t;
- i : Waktu
- β_0 : Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi
- X_1 : TPAK pada tahun ke-t
- X_2 : IPM pada tahun ke-t
- X_3 : Laju PDRB pada tahun ke-t

E_t : *Error term*

Persamaan diatas menunjukkan variabel dependen (Y) yaitu kemiskinan sedangkan variabel independen yaitu TPAK (X_1), IPM (X_2), dan laju PDRB (X_3). Adapun definisi operasional dari tingkat kemiskinan (Y) yaitu proporsi penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (satuan %). TPAK (X_1) yaitu persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk dalam angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan dibandingkan dengan total penduduk usia kerja (satuan persen). IPM (X_2) yaitu indikator komposit yang mengukur capaian pembangunan manusia dengan tiga dimensi dasar kesehatan yang diukur dengan angka harapan hidup saat lahir, pendidikan yang diukur melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, dan standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan (satuan persen). Laju PDRB harga konstan (X_3) yaitu total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah dalam periode waktu tertentu biasanya satu tahun (satuan persen). Untuk mendapatkan permodelan yang baik, penelitian ini harus memenuhi asumsi *Best Linier Unbiased Estimator (BLUE)*.

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan permodelan (1) dan berikut ini yakni hasil uji asumsi klasik.

1. Uji Multikolonieritas

Tujuan uji multikolonieritas adalah untuk mengetahui apakah persamaan model regresi yang digunakan oleh peneliti memiliki hubungan atau korelasi antar variabel independent dengan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan cara mendeteksi korelasi parsial antar variabel yang dilakukan dengan

melihat nilai koefisien antar variabel bebas. Sebagai pedoman (*rule of thumb*), apabila nilai koefisien korelasi nilainya lebih besar dari 0,8 maka terdapat indikasi adanya gejala multikolonieritas dalam model, namun sebaliknya jika nilainya kurang dari 0,8 maka diduga tidak ada gejala multikolonieritas (Hariani dkk., 2023).

Tabel 5. Uji Multikolonieritas

Variabel	TPAK	IPM	PDRB
TPAK	1,000	0,234	0,046
IPM	0,234	1,000	-0,018
PDRB	0,046	-0,018	1,000

Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 5 diatas diketahui bahwa nilai korelasi antara TPAK dan IPM = 0,234. Sementara korelasi antara TPAK dan PDRB = 0,046. Seluruh nilai korelasi berada jauh di bawah batas *rule of thumb* 0,8. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian tidak mengalami masalah multikolonieritas.

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen pada variabel dependen, sehingga tidak terjadi korelasi di antara pengamatan dari data observasi sebelumnya. Metode ini digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam residual model regresi. Hasil penelitian uji autokorelasi penelitian ini yaitu dijelaskan pada tabel 6.

Tabel 6. Uji Autokorelasi

Breusch Godfrey Serial Corellation LM			
F-	0,808382	Prob.	0,4704
statistic		F(2,6)	
Obs*R-	2,178450	Prob.	0,3365
squared		Chi-	
		Square(2)	

Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 6 diatas menunjukkan nilai F-statistik sebesar 0,808382 dengan nilai

prob F (2,6) 0,4704, serta nilai Obs*R-squared sebesar 2,178450. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti model penelitian yang digunakan tidak terdapat autokorelasi sehingga hasil estimasi dapat dilakukan dan tidak bias akibat hubungan antar residual.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui data yang digunakan oleh peneliti termasuk data yang memiliki penyimpangan atau tidak. Hasil penelitian uji heteroskedastisitas penelitian ini yaitu dijelaskan pada tabel 7.

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas

Uji Glejser			
F-	1,96643	Prob.	0,168
statisti	2	F(3,13)	9
c			
Obs*R	5,30644	Prob.	0,150
-	2	Chi-	7
square		Square(3	
d)	

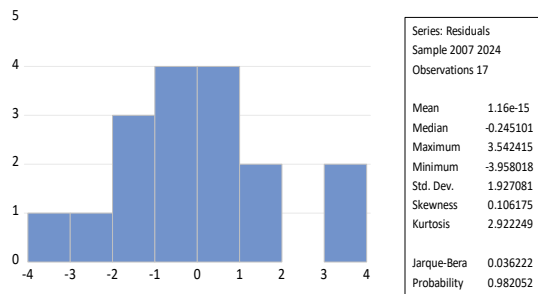
Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 7 diatas menunjukkan nilai F-statistik sebesar 1,966432 dengan nilai prob F (2,6) 0,1689, serta nilai Obs*R-squared sebesar 5,306442. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas, artinya varian residual bersifat homogen dan tidak tergantung pada nilai variabel independen.

4. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk menentukan data yang telah terkumpul berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki residu yang terdistribusi

normal. Penelitian ini menggunakan Jarque-Bera. Hasil penelitian uji normalitas penelitian ini yaitu dijelaskan pada gambar 1.



Gambar 1. Uji Normalitas

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil dari normalitas pada gambar 1 diatas diketahui bahwa nilai Jarque-Bera 0,036222 dengan Probability 0,982052. Nilai p-value 0,982052 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 maka model penelitian tersebut terdistribusi normal sehingga hasil estimasi model telah sesuai.

5. Uji Linearitas

Uji linearitas adalah uji dengan tujuan untuk mengetahui apakah dua variabel atau lebih yang diuji mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji linear dalam penelitian ini menggunakan Ramsey RESET test dengan tujuan untuk mengetahui bentuk fungsi regresi tersebut tepat. Hasil penelitian uji linearitas dijelaskan pada tabel 8.

Tabel 8. Uji Linearitas

	Nilai	Probabilitas
t-statistic	0,466358	0,6493
F-statistic	0,217490	0,6493

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil dari uji linearitas pada tabel 8 diatas diketahui bahwa nilai t-statistic 0,466358 dengan nilai probabilitas 0,6493, serta nilai F-statistic 0,217490 dengan nilai probabilitas yang sama yaitu 0,6493. Seluruh nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini berarti model regresi yang digunakan penelitian ini linear.

Secara keseluruhan dari hasil uji asumsi klasik ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) sehingga estimasi dapat digunakan untuk menguji pengaruh TPAK, IPM, dan Laju PDRB terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Batang periode 2007-2024. Hasil uji koefisien determinasi penelitian ini ditunjukkan pada tabel 9

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi

R-Squared	0,722458
Adjusted R-Squared	0,658410

Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 9 diatas nilai koefisien determinasi R^2 sebesar 0,722458, artinya sekitar 72,2% variasi variabel independen yang digunakan dalam model, yaitu TPAK, IPM, dan laju PDRB mampu menjelaskan tingkat kemiskinan di Kabupaten Batang sebesar 72,2% selama periode 2010-2024. Sisanya sebesar 27,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, misalnya seperti faktor sosial, budaya, kebijakan maupun variabel makroekonomi lainnya (inflasi, investasi, tingkat pengangguran, dll). Nilai adjusted r squared sebesar 0,658410 artinya sekitar 65,8% model mampu menjelaskan variasi tingkat kemiskinan. Hasil uji f dan uji t dalam penelitian ini disajikan pada tabel 10 di bawah ini:

Tabel 10. Hasil Uji f dan t

Variabel	Koefisien	t-Stat	Probabilitas.
C	28,03160	1,752211	0,1033
TPAK	0,040397	0,218431	0,8305
IPM	-0,132630	-0,709891	0,4903
Laju PDRB	-2,081762	-5,788363	0,0001
F-Statistic	11,27995		
Prob(F-statistic)	0.00000		

Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 10 diatas nilai uji f sebesar 66,44146 dengan probabilitas 0,000000 < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat secara simultan variabel TPAK, IPM dan PDRB bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Batang. Permodelan hasil regresi linear berganda secara matematis yakni sebagai berikut :

$$Y = 28,03160 + 0,040397TPAK - 0,132630IPM - 2,081762 \text{ Laju PDRB} + \epsilon_t \dots\dots\dots(2)$$

Intepretasi model diatas yaitu:

- Konstanta (intercept) sebesar 28,03160 dengan t statistik sebesar 1,752211 dan probabilitas 0,1033 (lebih besar dari signifikansi > 0,05 . Hal ini menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen TPAK, IPM dan laju PDRB dianggap konstan atau bernilai nol maka tingkat kemiskinan di Kabupaten Batang sebesar 28,03% dengan asumsi ceteris paribus.
- Koefisien TPAK sebesar 0,040397 artinya secara parsial jika terjadi peningkatan sebesar satu persen pada TPAK dengan asumsi variabel lain tetap maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0,040397 persen. Nilai t statistik sebesar 0,218431 dan probabilitas 0,8305 (lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, artinya TPAK tidak berpengaruh signifikan terhadap

tingkat kemiskinan di Kabupaten Batang.

- Koefisien IPM sebesar -0,132630 artinya secara parsial jika terjadi peningkatan sebesar satu persen pada IPM dengan asumsi variabel lain tetap maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,132630 persen. Nilai t statistik sebesar -0,709891 dan probabilitas 0,4903 (lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, artinya IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Batang.
- Koefisien Laju PDRB sebesar -2,081762 artinya jika terjadi peningkatan sebesar satu persen pada laju PDRB dengan asumsi variabel lainnya tetap maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar -2,081762 persen. Nilai t statistik sebesar -5,788363 dan probabilitas 0,0001 (lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, artinya laju PDRB berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Batang.

Pembahasan
Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel TPAK memiliki koefisien positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara teori, TPAK menggambarkan seberapa banyak penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif bekerja atau sedang mencari pekerjaan dibandingkan dengan total penduduk usia kerja. TPAK yang tinggi umumnya menunjukkan seberapa banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Namun, temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Batang, peningkatan TPAK belum memberikan dampak signifikan dalam menurunkan kemiskinan. Bahkan arah

hubungan TPAK dengan kemiskinan adalah positif, artinya jika terjadi kenaikan TPAK maka tingkat kemiskinan juga akan mengalami kenaikan. Hasil temuan ini berarti jika terjadi peningkatan jumlah penduduk yang masuk ke pasar tenaga kerja belum sepenuhnya diiringi dengan ketersediaan lapangan kerja produktif di Kabupaten Batang. Akibatnya sebagian angkatan kerja yang baru terserap masih berada pada sektor informal atau pekerjaan dengan upah rendah sehingga dampaknya terhadap penurunan kemiskinan belum terlihat nyata. Sektor informal disini misalnya pedagang kaki lima, buruh harian lepas, pekerja tanpa kontrak tetap atau pekerja dengan upah di bawah standar. Pekerjaan di sektor ini sering kali tidak memberikan jaminan penghasilan yang layak, tidak memiliki jaminan sosial, serta rentan terhadap guncangan ekonomi. Akibatnya meskipun jumlah orang yang bekerja mengalami peningkatan, namun kualitas dari pekerjaan tersebut tidak mampu membuat para pekerja keluar dari garis kemiskinan.

Masalah lainnya juga yaitu produktivitas tenaga kerja juga berperan penting. Kabupaten Batang sebagian besar angkatan kerjanya masih terserap dalam sektor-sektor tradisional seperti pada sektor pertanian dan perdagangan kecil. Sektor pertanian di daerah ini masih menghadapi beberapa kendala seperti ketergantungan pada musim, keterbatasan lahan, penggunaan teknologi yang rendah dan fluktuasi harga hasil panen. Kondisi ini membuat pendapatan petani cenderung rendah dan tidak stabil. Sehingga meskipun jumlah petani atau pekerja pertanian bertambah terus menerus, namun kontribusi pekerja tersebut terhadap penurunan kemiskinan masih sangat terbatas.

Faktor lainnya yaitu kualitas sumber daya manusia. Peningkatan jumlah tenaga

kerja tidak selalu diiringi dengan peningkatan keterampilan dan pendidikan yang baik. Banyak pekerja di Kabupaten Batang yang masih lulusan pendidikan menengah pertama atau bahkan lebih rendah sehingga para tenaga kerja sulit untuk dapat bersaing dalam pasar kerja yang menuntut keterampilan yang lebih tinggi. Akibatnya, para pekerja tersebut hanya mampu mengakses pekerjaan dengan upah yang lebih rendah dan kesejahterannya masyarakatnya pun akan rendah sehingga penurunan kemiskinan masih terbatas.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fauziah dkk., (2021) yang mengatakan bahwa TPAK berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2010 sampai 2019. Namun, hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Fikri & Suparyati (2017) yang menyatakan bahwa TPAK tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini juga sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa peningkatan partisipasi angkatan kerja tidak serta merta menurunkan kemiskinan jika tidak diikuti dengan penciptaan lapangan kerja yang produktif. Fenomena ini disebut dengan *jobless growth* atau pertumbuhan ekonomi terjadi namun tanpa diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang memadai. Pertumbuhan jumlah pekerja juga terjadi, namun sebagian besar pekerja masuk ke dalam sektor-sektor dengan produktivitas rendah sehingga tidak berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan. Hal ini memperlihatkan bahwa kemiskinan bukan hanya masalah ketiadaan pekerjaan namun juga berkaitan dengan kualitas pekerjaan dan upah yang diterima. Dengan demikian, kebijakan pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mendorong masyarakat untuk masuk ke dunia kerja saja namun juga harus

memastikan bahwa pekerjaan yang tersedia layak dan mampu memberikan pendapatan yang cukup untuk dapat hidup sejahtera.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel IPM memiliki koefisien negatif dan berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini mengindikasikan apabila terjadi peningkatan IPM maka akan cenderung menurunkan kemiskinan tetapi pengaruhnya tidak signifikan. Hal ini terjadi karena kondisi riil di Kabupaten Batang, meskipun IPM mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, peningkatan tersebut masih relatif lambat dibandingkan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat miskin. Misalnya pertama, dari segi pendidikan, terdapat peningkatan partisipasi sekolah namun jika dilihat dari segi kualitas pendidikan di beberapa wilayah pedesaan masih belum merata dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Banyak masyarakat miskin yang meskipun memiliki akses untuk ke sekolah, belum bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi, dikarenakan biaya, waktu, keterbatasan infrastruktur dan jarak. Akibatnya meskipun indikator pendidikan meningkat, ternyata belum banyak memberikan dampak langsung terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Kedua dari sisi kesehatan, meskipun terjadi kenaikan IPM dan terjadi kenaikan angka harapan hidup, tetapi masyarakat miskin seringkali menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Biaya pengobatan yang tinggi dan keterbatasan fasilitas di pedesaan juga bisa menjadi penghambat. Hal ini menyebabkan

masyarakat miskin rentan terhadap penyakit sehingga akan berdampak pada produktivitas kerja.

Ketiga dari sisi standar hidup layak, meskipun pendapatan per kapita mengalami peningkatan, namun distribusi pendapatan di Kabupaten Batang masih belum merata. Biasanya kelompok masyarakat dengan kelas ekonomi menengah dan atas, lebih cepat menikmati hasil pertumbuhan ekonomi, namun sebaliknya masyarakat miskin hanya menikmati hasil pertumbuhan ekonomi sedikit. Kondisi ini akan menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi sehingga menyebabkan tingkat kemiskinan tidak turun signifikan meskipun IPM mengalami peningkatan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Ristika dkk (2021) yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai hasil yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, namun hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Purboningtyas dkk., (2020) dan Sukron & Yasin (2021) yang menjelaskan bahwa IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Implikasi kebijakan dari temuan ini, pemerintah Kabupaten Batang harus lebih fokus pada pemerataan kualitas pembangunan manusia. Program peningkatan IPM tidak hanya berfokus pada peningkatan angka saja, namun juga harus bisa memastikan bahwa masyarakat miskin ikut serta serta merasa merasakan peningkatan tersebut. Adapun contoh program seperti beasiswa pendidikan bagi keluarga miskin, program kesehatan gratis, serta pelatihan pemberdayaan masyarakat miskin dapat memberikan manfaat dan peluang untuk kesejahteraan mereka.

Pengaruh Laju PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel laju PDRB memiliki koefisien negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Koefisien negatif menandakan semakin tinggi laju PDRB atau pertumbuhan ekonomi daerah, maka tingkat kemiskinan menurun. Hal ini juga sesuai dengan teori, bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan memberikan pengaruh terhadap efek pemerataan pendapatan dan kesempatan membuka kesempatan kerja baru, terutama untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Kabupaten Batang mempunyai sektor utama atau unggulan seperti sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan jasa dalam menggerakkan perekonomian daerah. Saat sektor-sektor tersebut berhasil untuk tumbuh, maka sektor-sektor tersebut memerlukan tenaga kerja, sehingga tenaga kerja akan terserap lebih banyak, akibatnya kesejahteraan masyarakat meningkat dan dapat keluar dari jerat kemiskinan. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan akses jalan, perbaikan transportasi, dan pengembangan kawasan industri dapat menarik investasi dan menciptakan peluang ekonomi baru sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang merata ini akan memberikan dampak langsung bagi masyarakat miskin melalui penciptaan lapangan kerja produktif, pendapatan, dan peluang usaha di sektor-sektor berbasis lokal.

Hasil temuan penelitian ini berbeda dengan hasil Pakpahan & Maria (2022) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Semarang periode 2002-2021. Sebaliknya, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Dama dan Lopian (2016) dan Nabawi, (2020) yang menyatakan bahwa

PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa bahwa TPAK memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini berarti meningkatnya jumlah penduduk yang masuk ke pasar kerja belum mampu diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja produktif sehingga belum memberikan dampak terhadap penurunan kemiskinan. IPM memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini berarti meskipun terjadi peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan, namun pengaruhnya belum kuat dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Batang. Laju PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya pertumbuhan ekonomi yang di Kabupaten Batang selama 2007-2024 secara nyata mampu menurunkan kemiskinan. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan aktivitas ekonomi di sektor-sektor utama atau unggulan seperti industri pengolahan, perdagangan, dan jasa yang mampu mendorong terciptanya lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kemiskinan mengalami penurunan.

Saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Batang yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui investasi bidang pendidikan dan kesehatan, memperluas lapangan kerja produktif diantaranya melalui program padat karya

yang diprioritaskan pada sektor-sektor pertanian, industri, dan pariwisata.

5. Daftar Pustaka

- [1] B. Prayitno and R. Yustie, "Pengaruh Tenaga Kerja, IPM Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kota Di Jawa Timur Tahun 2014-2018," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, vol. 16, no. 1, p. 47, 2020, doi: 10.30742/equilibrium.v16i1.825.
- [2] A. Nurkhin, Y. A. Rahman, A. S. Fauzi, and I. H. Saputro, "Analisis Pengaruh Investasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan," vol. 5, no. 2, pp. 313–324, 2024, doi: 10.15294/baej.v5i2.12563.
- [3] E. Hariani, R. F. Widyawati, R. T. Muhammad, M. Dwimastadji W, and B. Dewa L, "Pencegahan Stunting dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di 11 Kabupaten Jawa Timur," *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, vol. 3, no. 3, pp. 949–956, 2023, doi: 10.47709/jebma.v3i3.3187.
- [4] D. R. Fauziah, W. Juliprijanto, and J. A. Prakoso, "Pengaruh Investasi, Pendidikan, Kesehatan, Dan Tpk Terhadap Kemiskinan Di Pulau Jawa Tahun 2010-2019," *DINAMIC : Directory Journal of Economic*, vol. 3, no. 1, pp. 53–68, 2021.
- [5] R. O. Fikri and A. Suparyati, "Pengaruh Pendidikan, Kesehatan Dan Gender Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur," *Media Ekonomi*, vol. 25, no. 1, pp. 43–56, 2017, doi: 10.25105/me.v25i1.5203.
- [6] E. D. Ristika, W. P. Primandhana, and M. Wahed, "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur," *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, vol. 12, no. 2, p. 129, 2021, doi: 10.33087/eksis.v12i2.254.
- [7] I. Purboningtyas, R. Sari, T. Guretno, A. Dirgantara, A. Dwi, and M. Al Haris, "Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Analysis of The Influence of Open Unemployment Levels and Human Development Index on Poverty in Central Java Province," *Jurnal Sains dan Matematika Unpam*, vol. 3, no. 1, pp. 81–88, 2020.
- [8] I. Sukron and A. Yasin, "Pengaruh Ipm, Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah," *INDEPENDENT: Journal Of Economics*, vol. 1, pp. 47–65, 2021.
- [9] K. H. PAKPAHAN and N. S. B. MARIA, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kota Semarang Tahun 2002-2021," vol. 4, no. 4, pp. 59–70, 2022, [Online]. Available: <https://repofeb.undip.ac.id/11508/>.
- [10] J. I. S. Dama Himawan Yudistira, Agnes L Ch Lopian, "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado (Tahun 2005-2014)," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, vol. Volume 16, pp. 549–561, 2016.

- [11] Hafiz Nabawi, “Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan PDRB Terhadap Kemiskinan di Kota Malang,” *Oeconomicus Journal Of Economics*, vol. 4, no. 2, pp. 104–117, 2020.